

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG TURUT SERTA  
DALAM PEMALSUAN AKTA KELAHIRAN  
( Studi Kasus Putusan Nomor : 288/Pid.B/2011/PN.SPG )**

**Skripsi**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

**AFIF BAIDILLAH**  
NPM. 0871010076

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG TURUT  
SERTA DALAM PEMALSUAN AKTA KELAHIRAN  
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Sampang Nomor : 288/Pid.B/2011/PN.Spg)

Disusun Oleh :

AFIF BAIDILLAH  
NPM. 0871010076

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,  
  
Pembimbing Utama

Subani, SH, M.Si  
NIP. 19510504 198303 1 001

Mengetahui,  
  
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH, MM  
NIP. 1962025 199 103 1 00 1

HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG TURUT  
SERTA DALAM PEMALSUAN AKTA KELAHIRAN  
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Sampang Nomor : 288/Pid.B/2011/PN.Spg)

Oleh :

AFIF BAIDILLAH  
NPM. 0871010076

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh  
Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Pada tanggal 29 November 2012

Pembimbing Utama,

Tim Penguji,

Subani, SH, M.Si  
NIP. 19510504 198303 1 001

H. Sutrisno SH, M.Hum  
NIP. 1962025 199 103 1 00 1

Subani, SH, M.Si  
NIP. 19510504 198303 1 001

Fauzul Aliwarman, SH, M.Hum  
NPT. 3 8202 07 0221

Mengetahui,  
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro  
NIP. 1962025 199 103 1 00 1

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG TURUT  
SERTA DALAM PEMALSUAN AKTA KELAHIRAN  
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Sampang Nomor : 288/Pid.B/2011/PN.Spg)

Oleh :

AFIF BAIDILLAH  
NPM. 0871010076

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh  
Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Pada tanggal 29 November 2012

Pembimbing Utama,

Tim Penguji,

Subani, SH, M.Si  
NIP. 19510504 198303 1 001

H. Sutrisno SH, M.Hum  
NIP. 1962025 199 103 1 00 1

Subani, SH, M.Si  
NIP. 19510504 198303 1 001

Fauzul Aliwarman, SH, M.Hum  
NPT. 3 8202 07 0221

Mengetahui,  
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro  
NIP. 1962025 199 103 1 00 1

## Surat Pernyataan Keaslian Penulisan Skripsi

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afif Baidillah  
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 24 Desember 1988  
NPM : 0871010076  
Kosentrasi : Pidana  
Alamat : Jl. Griyo Mapan Sentosa Ai-43, Waru, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :  
“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG TURUT  
SERTA DALAM PEMALSUAN AKTA KELAHIRAN (Studi Kasus pada  
Putusan Nomor : 288/Pid.B/2011/PN.Spg) dalam rangka memenuhi syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas  
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya  
cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan  
hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka  
saya akan bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan  
saya (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan  
penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Sidoarjo, 29 November 2012

Mengetahui,  
Pembimbing

Penulis,

Subani, SH, M.Si  
NIP. 19510504 198303 1 001

Afif Baidillah  
NPM. 0871010076

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillahirabbill'aalamiin, segala puji bagi Allah SWT, sang pemberi nafas pada seluruh makhluk. Hanya kepadaNya-lah syukur di panjatkan atas selesainya Skripsi ini sejujurnya penulis akui bahwa pendapat sulit ada benarnya, tetapi faktor kesulitan itu lebih banyak datang dari diri karena itu, kebanggaan penulis bukanlah pada selesainya Skripsi ini, melainkan kemenangan atas berhasilnya menundukan diri sendiri. Semua kemenangan dicapai tidak lepas dari bantuan berbagai pihak selama proses penyelesaian Skripsi itu, sehingga penulis mampu menyusun skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG TURUT SERTA DALAM PEMALSUAN AKTA KELAHIRAN”**. Penulisan ini di susun untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan Tugas Akhir dalam mencapai Sarjana Hukum.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan petunjuk dan bantuan yang tidak ternilai harganya, dengan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak H. Sutrisno, SH., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs. Gendut Sukarno, MS. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak Subani, SH., M.Si, Selaku Ketua Proqram Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Dan selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dengan baik.
5. Bapak Fauzul Aliwarman, S.Hi., M.Hum. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
6. Bapak / Ibu Dosen dan semua staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan untuk segera menyelesaikan Skripsi ini.
7. Kepada yang terhormat dan tersayang kedua orang tua M. Yunus, Sri Rasmi Suryani, S.Sos dan kekasih tercinta Ayu Ambarwati beserta Keluarga Besar Penulis yang telah membantu memberikan semangat dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu merupakan kebahagiaan tersendiri bagi penulis apabila ada saran dan kritik yang sifatnya membangun. sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Akhir kata, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan berharap Skripsi ini memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu hukum pada khususnya dan pada umumnya.

Sidoarjo, 29 November 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAKSI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian	
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis .....	6
1.5 Kajian Pustaka .....	7
1.5.1 Pengertian Hukum Pidana.....	7
1.5.2 Jenis-jenis Pidana.....	7
1.5.3 Pengertian Tindak Pidana .....	8
1.5.4 Unsur – unsur Tindak Pidana.....	9



1.5.5 Subjek Hukum dan Rumusan Delik .....	9
1.5.6 Pelaku Perbuatan Pidana .....	10
1.5.7 Pengertian Pemalsuan.....	11
1.5.7.1 Jenis-jenis Pemalsuan.....	12
1.5.7.2 Pemalsuan Surat Pada Umumnya.....	13
1.5.8 Pemalsuan Dalam Surat-surat.....	14
1.5.8.1 Membuat Surat Palsu.....	15
1.5.8.2 Memalsukan Surat.....	15
1.5.9 Definisi Kriminologi .....	16
1.5.10 Faktor-faktor Kriminologi.....	17
1.5.11 Pasal-Pasal Yang Berkaitan Dengan Pemalsuan Didalam KUHP .....	18
1.5.12 Pengertian Dokumen, Surat, Akta, Akta Kelahiran .....	22
1.5.13 Pertanggungjawaban .....	23
1.6 Metode Penelitian .....	25
1.6.1 Jenis Penelitian .....	25
1.6.2 Sumber Data.....	26
1.6.3 Pengumpulan Data.....	27
1.6.4 Teknik Analisis Data .....	27
1.6.5 Sistematika Penulisan.....	27

## BAB II FAKTOR YANG MENDORONG PELAKU TURUT SERTA

### DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA

KELAHIRAN .....	30
2.1 Gambaran Kasus .....	30

2.2 Kualifikasi Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Akta Kelahiran .....	32
2.3 Faktor –Faktor Penyebab Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pemalsuan .....	37
<b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU YANG TURUT SERTA</b>	
<b>DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA KELAHIRAN.....</b>	<b>41</b>
3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Dalam Putusan Nomor :	
288/Pid.B/2011/PN.Spg.....	41
3.2 Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Dalam Pemalsuan	
Akta Kelahiran .....	47
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
4.1 Kesimpulan .....	53
4.2 Penutup .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Sampang
- Lampiran 3 : Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Sampang
- Lampiran 4 : Surat Pengantar Research / Penelitian Pengadilan Negeri Sampang
- Lampiran 5 : Putusan Perkara Nomor : 288/Pid.B/2011/PN.SPG

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “ VETERAN “ JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM

Nama : Afif Baidillah  
NPM : 0871010076  
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 24 Desember 1988  
Program Studi : Strata 1 ( S1 )  
Judul Skripsi :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG TURUT  
SERTA DALAM PEMALSUAN AKTA KELAHIRAN  
(Studi Kasus Putusan Perkara Pengadilan Negeri Sampang Nomor :  
288/Pid.B/2011/PN.Spg)

**ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang turut serta dalam pemalsuan akta kelahiran, dimana hal tersebut bertujuan untuk membahas faktor – faktor yang mendorong pelaku yang turut serta dalam tindak pidana pemalsuan akta kelahiran dan bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan akta kelahiran. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dapat bahan hukum primer misalnya Undang – Undang Dasar 1945, bahan hukum sekunder karya – karya ilmiah, rancangan undang – undang, dan juga hasil – hasil dari suatu penelitian, bahan hukum tersier misalnya bibliografi, kamus dan lain – lain. Analisa data menggunakan analisa kualitatif yang diperoleh dari data wawancara. Hasil penelitian dapat disimpulkan berupa gambaran kasus dalam putusan perkara nomor : 288/Pid.B/2011/PN.Spg, kualifikasi kasus tindak pidana pemalsuan akta kelahiran diantaranya mencakup perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Faktor – faktor penyebab turut serta dalam tindak pidana pemalsuan akta kelahiran diantaranya adalah faktor sosial ekonomi, dan faktor lingkungan,. Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana pemalsuan akta kelahiran, dimana pertimbangan tersebut diantaranya mencakup pertimbangan hakim yang memberatkan dan pertimbangan hakim yang meringankan. Pertanggungjawaban pelaku yang turut serta dalam tindak pidana pemalsuan akta kelahiran yaitu jiwanya normal, dewasa, mampu membedakan perbuatan yang benar dan yang salah.

**Kata Kunci : Pertanggung Jawaban, Pemalsuan Surat, Akta Kelahiran**

UNIVERSITY NATIONAL DEVELOPMENT "VETERAN" EAST JAVA  
FACULTY OF LAW

Name : Afif Baidillah  
NPM : 0871010076  
Place Date of Birth : Surabaya, December 24, 1988  
Study Program : Strata 1 (S1)  
Thesis Title :

CRIMINAL LIABILITY FOR ACTORS WHO PARTICIPATED IN THE  
BIRTH CERTIFICATE FORGERY  
(Case Study Sampang Court Decision on Case No.: 288/Pid.B/2011/PN.Spg)

**ABSTRACT**

This study aims to determine the criminal liability of the perpetrators took part in falsifying a birth certificate, which it aims to address factors - factors that encourage the actors who participated in criminal falsification of birth certificates and other forms of accountability for perpetrators who participated crime forgery of a birth certificate. This study uses the methodology of normative law. Source of data used are secondary data to primary legal materials such Act - 1945, the work of secondary legal materials - papers, draft legislation - legislation, and also the result - the result of a research, legal materials such tertiary bibliographies, dictionaries and other - other. Analysis of data obtained using qualitative analysis of interview data. The results can be summarized in the form of an overview of cases in the court ruling number: 288/Pid.B/2011/PN.Spg, qualifying criminal cases including birth certificate fraud includes acts that can be categorized as a crime. Factor - factor participating in the birth certificate forgery offenses such as socioeconomic factors, and environmental factors. Consideration of judges in deciding a criminal case forgery birth certificate, which includes consideration of such consideration burden of judges and judges mitigating considerations. The perpetrators who participated in criminal forgery of birth certificates are normal soul, mature, capable of distinguishing right actions and wrong.

**Keywords:** Accountability, Mail Fraud, Birth Certificates

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan media mencerdaskan kehidupan bangsa. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk membangun tatanan bangsa yang menganut nilai kepintaran, kepekaan, dan kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah penting karena merupakan hal yang signifikan dan sentral karena ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan peranan penting dalam dunia pendidikan sehingga bangsa ini betul-betul membuka mata terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ilmu pengetahuan dan teknologi dihadirkan untuk mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang beradab dan berbudaya.

Perkembangan zaman saat ini telah berkembang pesat tindak pidanaupun tidak dapat dihindarkan. Cukup banyak masyarakat Indonesia terlibat dengan tindak pidana di dalam bidang pengetahuan dan teknologi karena mereka berpikiran bahwa ingin berkembang dan maju secara instan dan praktis. Perkembangan tindak pidana berkembang seiring dengan berjalanya waktu ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup berkembang pesat, bentuk perkembangan tindak pidana terjadi berupa kejahatan atau pelanggaran dengan segala tujuan tertentu. Hal tersebut merupakan suatu tindakan yang menyimpang dengan aturan hukum yang berlaku. Tindak pidana dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, mengenai tidak dikenalnya pembedaan antara disengaja atau tidak disengaja dalam

menggolongkan suatu tindakan sebagai tindak pidana di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi semua bentuk tindak pidana tersebut berwujud kesalahan yang telah diatur secara yuridis dalam aturan-aturan hukum yang berlaku.

Maraknya berbagai bentuk perkembangan kejahatan suatu bukti bahwa ahklak dan moralitas masyarakat yang berkurang, akan tetapi pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempunyai peran penting dalam berkembangnya tindak pidana kejahatan, sebagai contoh akhir – akhir ini semakin maraknya kejadian tindak pidana yang bermacam – macam di kabupaten sampang dengan durasi tahun 2011-2012 menangani 61 kasus dan berdasarkan wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Sampang telah terjadi 3 bentuk kejahatan pemalsuan surat selama tahun 2011-2012.

Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempunyai peran penting dalam berkembangnya tindak pidana kejahatan, beragam bentuk tindak pidana kejahatan saat ini marak terjadi. Salah satunya antara lain bentuk tindak pidana pemalsuan, pemalsuan terdiri dari beberapa macam bentuk pemalsuan diantaranya pemalsuan uang, sumpah palsu, pemalsuan merk dan materai dan pemalsuan surat penting. Tindak pidana yang menarik untuk saat ini adalah pemalsuan surat Akta Kelahiran. Dimana tindak pidana pemalsuan surat berkembang pesat dan marak terjadi, dimana salah satunya pemalsuan Akta Kelahiran tersebut. Mengenai surat Akta Kelahiran sangatlah penting karena Akta Kelahiran suatu surat identitas resmi pertama yang dimiliki oleh seorang manusia di dunia ini sebagai tanda

bahwa manusia lahir mempunyai surat identitas yang sah. Namun di era modern saat ini kemajuan teknologi yang semakin pesat tindak pidana pemalsuan surat Akta Kelahiran suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat yang menunjang pelaku tindak kejahatan lebih mudah dan praktis untuk melakukan tindak pidana kejahatan yaitu pemalsuan surat penting Akta Kelahiran dengan menggunakan teknologi seperti mesin scanner.

Pemalsuan surat marak terjadi saat ini, terutama dalam pemalsuan akte lahir, Seperti contoh kasus yang terjadi tentang pemalsuan surat penting yaitu Akta Kelahiran bermula dari pertemuan singkat antara saudara Munahah dengan Hasbullah, pada pertemuan singkat itu Hasbullah menawarkan kepada Munahah kalau Hasbullah bisa membuatkan Akta Kelahiran tanpa persyaratan dan tanpa masalah hanya dengan memberikan identitas diri Nama Lengkap, Nama Kedua Orang Tua dan Anak yang keberapa dengan biaya cukup relative murah dengan biaya sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) karena mendengar dari penjelasan Hasbullah kepada Munahah. Munahah tergiur, tertarik dengan tawaran untuk pembuatan Akta Kelahiran yang biayanya relative murah dan pada akhirnya Munahah mencoba memesan kepada Hasbullah untuk dirinya sendiri, isteri dan anaknya dengan biaya per akte Rp.120.000,-. Seminggu kemudian akte pesanan Munahah selesai, setelah mendapatkan Akta Kelahiran dari Hasbullah, Munahah mencoba menawarkan kepada Mashuri bahwa mengurus akta kelahiran tanpa persyaratan hanya dengan memberikan data nama lengkap, nama kedua



orang tua dan anak beberapa dengan biaya Rp.150.000,- kepada Munahah. Selanjutnya Munahah menyampaikan kepada Hasbullah untuk dibuatkan Akta Kelahiran atas nama Mashuri, Saiman, dan Miftahul Huda dengan biaya Rp. 120.000,- per aktenya Munahah meraup keuntungan Rp.30.000,- per aktenya. Dalam satu minggu Akta Kelahiran tersebut selesai dan diserahkan kepada Mashuri dan pada saat Akta Kelahiran atas nama Mashuri, Saiman dan Miftahul Huda tersebut dilegalisir ke kantor kecamatan sipil diketahui palsu, dari kunjungan legalisir ke kantor kecamatan sipil itulah Mashuri tahu kalau Akte yang dibuatkan oleh Munahah palsu. Oleh karena itu Munahah telah melakukan pemalsuan Akta Kelahiran dan turut serta melakukan pemalsuan Akta Kelahiran.

Masalah pemalsuan Akta Kelahiran merupakan bentuk kejahatan yang masih kurang dipahami oleh masyarakat, terutama tentang akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan Akta Kelahiran tersebut. Masyarakat yang kurang paham akan hal itu terkadang menganggap bahwa memalsukan Akta Kelahiran merupakan salah satu cara yang efektif disaat mereka terdesak oleh waktu sedangkan mereka sangat membutuhkan. Saat ini masyarakat modern ini berpikir atau berperilaku untuk mendapatkan sesuatu secara instan dan murah dari segi ekonomi, sehingga banyak orang melalui jalan instan dengan cara memalsukan seperti halnya pemalsuan surat atau Akta Kelahiran. Namun hal itu seharusnya tidak boleh dilakukan karena tindakan pemalsuan Akta Kelahiran merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan aturan hukum, sehingga akibatnya merugikan individu, masyarakat, dan

Negara dan perbuatan kejahatan tersebut dapat diancam sanksi hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku dan harus mampu dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya.

Berkembangnya ilmu pengetahuan bukan berarti berkembangnya dasar pemikiran masyarakat secara negative, banyak juga perkembangan ilmu pengetahuan membuat manusia berpikir secara radikal atau berpikir negative sehingga banyak juga yang menyalahgunakan adanya perkembangan ilmu pengetahuan tersebut.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa yang mendorong pelaku turut serta dalam melakukan tindak pidana pemalsuan Akta Kelahiran dalam putusan perkara nomor : 288/Pid.B/2011/PN.SPG ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan Akta Kelahiran dalam putusan perkara nomor : 288/Pid.B/2011/PN.SPG ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong pelaku dalam melakukan tindak pidana pemalsuan Akta Kelahiran.
- b. Untuk mengetahui sanksi atau bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana pemalsuan Akta Kelahiran.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

### 1.4.1 Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pidana pada khususnya dalam menghadapi perkembangan tindak pidana pemalsuan akte kelahiran bersangkut paut dengan pemalsuan surat lainnya dengan menggunakan cara manual atau menggunakan alat-alat modern.

### 1.4.2 Praktis

#### 1. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pencegahan terjadinya tindak pidana pemalsuan surat, dimana hal tersebut juga merupakan tanggungjawab Pemerintah.

#### 2. Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan masukan terhadap lembaga hukum tepatnya di Kabupaten Sampang untuk mengadili seadil-adilnya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan.

#### 3. Masyarakat

Tulisan ini diharapkan dapat membentuk kesadaran masyarakat terhadap akibat adanya tindak pidana kejahatan terutama tindak pidana kejahatan pemalsuan surat.

## 1.5 Kajian Pustaka

### 1.5.1 Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah peraturan-peraturan memuat atau mengandung tentang larangan atau keharusan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat, yang disertai dengan hukumanya.<sup>1</sup>

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserata sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku.<sup>2</sup>

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau penyiksaan.<sup>3</sup>

### 1.5.2 Jenis-Jenis Pidana

Jenis-jenis pidana menurut pasal 10 KUHP terdiri dari :

- a. Pidana pokok meliputi
  1. Pidana mati
  2. Pidana penjara
  3. Pidana kurungan
  4. Pidana denda
- b. Pidana tambahan meliputi
  1. Pencabutan hak-hak tertentu
  2. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu

---

<sup>1</sup> Rien G. Kartasapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap, Bina Aksara, Cet I, Jakarta 1988, h 47

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Cet III, Jakarta 2008 h 6

<sup>3</sup> C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Cet VII, Jakarta 1986, h 257

### 3. Pengumuman keputusan hakim.<sup>4</sup>

#### 1.5.3 Pengertian Tindak Pidana

Kata tindak pidana merupakan terjemahan dari “ strafbarr feit “ secara umum tindak pidana merupakan konsep yuridis yang dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku manusia yang dapat diberikan sanksi/hukuman berdasarkan hukuman pidana.<sup>5</sup>

Moeljatno menerangkan, bahwa “ strafbarr feit “ perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup>

Simons berpendapat bahwa “ strafbarr feit “ adalah perbuatan manusia yang betentangan dengan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan kepada si pembuatnya (si pelaku).<sup>7</sup>

Pengertian dari “ strafbarr feit “ adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>8</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid, h 260

<sup>5</sup> Sukardi, Penyidikan Tindak Pidana Tertentu, Restu Agung, Cet XIV, Jakarta, 2009, h6

<sup>6</sup> Ibid, h 7

<sup>7</sup> C.S.T Kansil, Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi, Sinar Grafika, Cet I, Jakarta, 1993, h 106

<sup>8</sup> Bambang Poernomo, Asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Cet VI, Jakarta, 1992, h 91

<sup>9</sup> Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Cet I, Jakarta, 2008, h 164

Menurut simons “ strafbarr feit “ adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>10</sup>

#### 1.5.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana

- a. Tindak pidana dilihat dari sudut obyektif adalah suatu tindakan berbuat atau lalai berbuat yang bertentangan dengan hukum positif yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum.
- b. Tindak pidana dilihat dari segi subyektif adalah bahwa akibat yang tidak di inginkan undang-undang, yang dilakukan oleh pelaku, dapatkan diberatkan kepadanya.<sup>11</sup>

#### 1.5.5 Subjek Hukum dan Rumusan Delik

Pada masa sekarang semua manusia merupakan subjek hukum. Manusia merupakan subjek hukum selama ia masih hidup, yaitu sejak saat dilahirkan sampai meninggal dunia. Bahkan dalam sistem civil law dikenal ungkapan (maxim) nasciturus pro iam nato habetur yang artinya anak yang belum dilahirkan yang masih dalam kandungan dianggap telah dilahirkan apabila kepentingannya memerlukan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penetensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2010 h9

<sup>11</sup> L.V Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan xxiv, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, h 326-327

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Cet I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h 241

Delik mempunyai sifat melarang atau mengharuskan suatu perbuatan tertentu dengan ancaman pidana kepada barangsiapa melakukannya, dan delik harus ditujukan kepada :

- a. Memperkosa suatu kepentingan hukum atau menusuk suatu kepentingan hukum seperti pembunuhan, pencurian dan sebagainya
- b. Membahayakan suatu kepentingan hukum yang dibedakan menjadi :
  - 1) Concrete gevaarzettingsdelicten, seperti misalnya kejahatan membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang pasal 187, pemalsuan surat pasal 263 KUHP yang menimbulkan suatu ketakutan ataupun kemungkinan kerugian.
  - 2) Abstracte gevaarzettingsdelectien, seperti dalam penghasutan, sumpah palsu dan sebagainya yang juga diatur dalam KUHP.<sup>13</sup>

#### 1.5.6 Pelaku Perbuatan Pidana

Pasal-pasal dalam KUHP selalu diawali dengan kata "barangsiapa" yaitu pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum.

Pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 55 KUHP, yang menentukan:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atas martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

---

<sup>13</sup> Bambang Poernomo, op cit. h 92

- (2) terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Ketentuan Pasal 55 KUHP di atas berkaitan dengan pelaku tindak pidana baik kejahatan atau pelanggaran, yang berarti tidak membedakan antara pelaku tindak pidana atas dasar kejahatan maupun pelanggaran.

Pelaku tindak pidana menurut Pasal 55 KUHP di atas dibedakan menjadi empat bagian, yaitu:

1. Orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan.
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.
4. Orang yang dengan pemberian upah (uitlokker) orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan. Yang disebutkan pasal itu artinya tidak boleh memakai jalan lain.<sup>14</sup>

#### 1.5.7 Pengertian Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal

---

<sup>14</sup> Soesilo, KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi Pasal, Bogor, 1991, h 72-74



sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.<sup>15</sup>

#### 1.5.7.1 Jenis-jenis pemalsuan :

- a. Pemalsuan Intelektual (intellectuele valsheid) pemalsuan tentang isi surat atau tulisan
- b. Pemalsuan mata uang (muntvervalsing): pemalsuan mata uang, Uang kertas Negara atau bank dan dipergunakan sebagai yang asli.
- c. Pemalsuan materiel (valsheid in zegel) : pemalsuan tentang bentuk surat atau tulisan
- d. Pemalsuan merek (valsheid van merken) : pemalsuan merek dengan maksud menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah merek yang asli.
- e. Pemalsuan materai (valsheid in zegel) : pemalsuan materai yang dikeluarkan Negara, atau peniruan tanda tangan, yang diperlukan untuk keabsahan meterai dengan maksud

---

<sup>15</sup> <file:///D:/Referensi/Pemalsuan%20surat/tindak-pidana-pemalsuan.html>, 17 Juli 2012, 23.18

menggunakanya atau menyuruh orang lain untuk memakainya seolah-olah materai yang asli.

- f. Pemalsuan tulisan (*valsched in geschrifte*) pemalsuan tulisan termasuk surat, akta dokumen, atau peniruan tanda tangan orang lain, dengan maksud menerbitkan hak, menghapus utang serta menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah tulisnaya yang asli.<sup>16</sup>

#### 1.5.7.2 Pemalsuan surat pada umumnya :

Tindak Pidana oleh pasal 263 ayat (1) dirumuskan sebagai : membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari utang atau surat-surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian, dengan tujuan dan maksud untuk memakai surat itu atau untuk menyuruh orang itu dapat mengakibatkan suatu kerugian. Tindak pidana ini oleh pasal 263 ayat (1) dinamakan (kualifikasi) pemalsauan surat (*valscheid in geschrift*) dan diancam dengan hukuman maksimal enam tahun penjara.

Dengan demikian, tindak pemalsuan setiap surat dikenai hukuman tetapi diadakan pembatasan, yaitu dibatasi pada dua macam surat :

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, op cit. h113

1. Surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau pembebasan dari utang
2. Surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian<sup>17</sup>

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri dari atas unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif : dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut
- b. Unsur-unsur obyektif :
  - 1) Barangsiapa
  - 2) Membuat secara palsu atau dipalsukan
  - 3) Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang
  - 4) Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan secara kenyataan
  - 5) Penggunaanya dapat menimbulkan suatu kerugian.<sup>18</sup>

#### 1.5.8 Pemalsuan Dalam Surat-Surat

Tindak pidana memalsukan surat adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara mengubah surat asli sedemikian rupa, hingga isinya menjadi lain dari aslinya. Caranya, misalnya, pelaku

---

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Reflika Aditama, Cet III, Bandung, 2010, h 187

<sup>18</sup> P.A.F Laminating, Delik-Delik Khusus kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, alat pembayaran, alat bukti, dan Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta, h.7-8

menghapus, mengurangi, menambah, maupun merubah angka/kata-kata yang tertera pada surat yang dipalsukannya. Memalsukan tanda tangan serta mengganti foto orang lain menjadi foto petindak dalam suatu surat, termasuk katagori perbuatan pidana memalsukan surat.<sup>19</sup>

Titel XII Buku II KUHP. Maka, KUHP berturut-turut memuat empat title, semua tentang kejahatan terhadap kekuasaan umum. Jadi jelaslah bahwa pemalsuan dalm surat-surat dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan masyarakat dalam keseluruhanya, yaitu kepercayaan masyarakat kepada isi surat-surat daripada bersifat mengenai kepentingan dari individu-individu yang mungkin secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini.<sup>20</sup>

#### 1.5.8.1 Membuat Surat Palsu

Hal ini terjadi misalnya apabila :

1. Seorang A membuat surat seolah-olah berasal seorang B dan menandatangani dengan meniru tanda tangan B
2. Seorang A membuat surat dan menandatanginya sendiri tetapi isinya tidak benar
3. Seorang A mengisi kertas kosong yang ada tangan dari B dengan tulisan yang tidak benar.<sup>21</sup>

#### 1.5.8.2 Memalsukan Surat

Hal ini terjadi misalnya apabila :

---

<sup>19</sup> file:///D:/Referensi/Pemalsuan%20surat/memalsukan-surat-atau-membuat-surat.html , 23:26, 17 Juli 2012

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro, op cit. h 190

<sup>21</sup> Ibid

1. Seorang A mengubah surat dari B yang sudah selesai tertulis sedemikian rupa sehingga surat menjadi lain dan tidak benar, jadi menyimpang dari kehendak si penanda tangan, si B
2. Seorang A mengubah tanda tangan dari B menjadi tanda tangan orang lain, misalnya C, sehingga seolah-olah isi surat tersebut berasal dari C.<sup>22</sup>

#### 1.5.9 Definisi Kriminologi

Kriminologi berasal dari bahasa latin *crimen* dan yunani-*logia* yang menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkat, penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi.<sup>23</sup>

Menurut Vouin-Laute Sutherland dan Cressey suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan sebagai berikut :

1. Sebelum suatu perbuatan disebut sebagai kejahatan harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata, yang berupa kerugian
2. Kerugian yang ditimbulkan harus merupakan kerugian yang dilarang oleh undang-undang dan secara jelas tercantum dalam hukum pidana
3. Harus ada perbuatan yang membiarkan terjadinya perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut
4. Dalam melakukan perbuatan tersebut harus terdapat maksud jahat atau “*mens rea*”
5. Harus ada hubungan antara perilaku dan “*mens rea*”
6. Harus ada hubungan kausal antara kerugian yang dilakukan undang-undang dengan perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri tanpa adanya unsur paksaan

---

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Indah Sri Utari, Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi, Thafa Media, Cet I, Semarang, 2012, h1

7. Harus ada pidana terhadap perbuatan tersebut yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>24</sup>

#### 1.5.10 Faktor-Faktor Kriminologi

1. Faktor lingkungan : Sifat-sifat pada umumnya sulit diubah tetapi dengan didikan yang baik dapatlah diusahakan berkurangnya sifat-sifat yang kurang baik itu. Disini pengaruh faktor lingkungan turut menentukan pembentukan watak individu, tetapi sebaliknya juga faktor lingkungan ini dapat mempengaruhi pembentukan watak individu yang tidak atau kurang baik.
2. Faktor Penegakan Hukum : Yang dikehendaki adalah terciptanya peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang sanksinya tegas dan dapat dirasakan. Sehubungan dengan yang erat hubungannya adalah adanya barisan penegak hukum yang mempunyai integritas yang berwibawa yang mempunyai dedikasi sebagai penegak hukum dan rasa kepercayaan pada masyarakat bahwa aparat pemerintah penegak hukum benar-benar “int tact” (bekerja, tidak tanpa guna).
3. Faktor Sosial Ekonomi : Keadaan sosial ekonomi suatu masyarakat yang merupakan tempat yang subur untuk timbulnya kejahatan adalah masyarakat yang sosial ekonominya jelek antara lain sebagai berikut :
  - a. Merajalelanya kemiskinan/kemelaratan

---

<sup>24</sup> Ibid, h 8-9

- b. Terdapatnya perbedaan sosial ekonomi yang sangat menyolok antara si kaya dan si miskin sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan tidak puas
- c. Peraturan perundang-undangan yang tidak menguntungkan si miskin dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengadaan sosial masyarakatnya
- d. Banyaknya pengangguran
- e. Banyaknya orang-orang gelandangan.<sup>25</sup>

#### 1.5.11 Pasal-Pasal yang Berkaitan dengan Pemalsuan Didalam KUHP

Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHPidana, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan akta yang diatur dalam pasal 263 KUHPidana. s/d Pasal 276 KUHPidana.

Tindak Pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHPidana membuat surat palsu atau memalsukan surat; dan Pasal 264 memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik.

Adapun Pasal 263 KUHPidana, berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu,

---

<sup>25</sup> Hand Out, Mata Kuliah Kriminologi, h.15-16

diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;

- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sedangkan Pasal 264 KUH-Pidana berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
  - a. Akta-akta otentik;
  - b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya atau pun dari suatu lembaga umum;
  - c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
  - d. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  - e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.



Sedangkan Pasal 266, berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- 2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.
- (1) barang siapa membikin surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan daripada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu dapat mendatangkan kerugian, maka karena memalsukan surat, dipidana dengan dengan pidana penjara selama – lamanya enam tahun.
- (2) dipidana dengan pidana penjara semacam itu juga, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

Penjelasan :

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang membikin surat palsu atau memalsukan surat :

- 1) Yang dapat menerbitkan sesuatu hak ;
- 2) Yang dapat menerbitkan suatu peruntungan;
- 3) Yang dapat membebaskan dari pada utang;
- 4) Yang dapat menjadi bukti sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

Selanjutnya ayat ( 2 ) mengancam hukuman kepada orang yang dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

- a) Surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak misalnya : surat izin mengemudi, ijazah, karcis tanda masuk, surat saham, dan lain sebagainya.
- b) Surat yang dapat menerbitkan suatu perutusan misalnya surat kuasa untuk dapat membuat utang.
- c) Surat yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal , misalnya : Akta Kelahiran, akte kematian, akte pendirian sesuatu usaha, dan lain sebagainya.
- d) “ surat palsu “ dapat diartikan surat yang disusun sedemikian rupa, sehingga isinya tidak pada mestinya ( tidak benar )
- e) “ memalsukan surat “ berarti mengubah surat itu sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari pada isi surat yang asli.
- f) “ memalsukan tanda tangan yang berkuasa menanda tangani “ termasuk dalam pengertian “ memalsukan surat “. Demikian pula menempelkan pas foto orang lain dari pada yang berhak dalam ijazah sekolah, surat izin mengemudi, harus dapat dipandang sebagai suatu pemalsuan.

- g) “dapat mendatangkan kerugian”, tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada, tetapi cukup dengan adanya “kemungkinan” saja.
- h) Yang diartikan “kerugian” tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga kerugian – kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya.<sup>26</sup>

#### 1.5.12 Pengertian Dokumen, Surat, Akta, Akta Kelahiran

Dokumen ialah surat yang tertulis /tercetak yang dapat dipakai sebagai barang bukti atau keterangan (seperti : Akta Kelahiran, surat nikah, surat perjanjian).<sup>27</sup>

Surat adalah :

- a. Kertas (kain, dan sebagainya) yang bertulis (berbagai-bagai isi maksudnya).
- b. Secarik kertas (kain,dan sebagainya) sebagai tanda keterangan.<sup>28</sup>

Akta adalah surat yang ditandatangani (si) pembuat untuk kepentingan pembuktian.<sup>29</sup> Akta Kelahiran adalah sebuah akta yang dikeluarkan negara melalui pejabat yang berwenang yang berisi identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang

---

<sup>26</sup> R. Sugandhi, KUHP Kitab Undang – undang Hukum Pidana berikut Penjelasannya, Usaha Nasional, 1980, h. 280-281

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1990, h 211

<sup>28</sup> Ibid, h 872

<sup>29</sup> Andi Hamzah, op.cit. h. 7

tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang. Akta Kelahiran merupakan salah satu bukti kewarganegaraan seseorang.<sup>30</sup>

#### 1.5.13 Pertanggungjawaban

Yang dimaksud dengan suatu tindakan adalah sesuatu yang dapat dihindari sebagaimana yang dikehendaki oleh seseorang artinya orang tersebut dapat menentukan pilihan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Berdasarkan pemikiran ini, seorang yang normal adalah orang yang sanggup menentukan kehendaknya dan tidak bertindak sesuai dengan yang dikehendaknya, orang tersebut dianggap tidak normal. Dalam hal demikian, tindakan orang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>31</sup>

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : tidak pidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld actus non facit reum nisi mens sist rea*).<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> <file:///D:/Referensi/akta%20kelahiran/index.php.htm>, 18 Juli 2012, 00:00

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, op cit, h 256

<sup>32</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Cet VIII, Jakarta, 2009, h. 165

Dengan demikian ternyata bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus :

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>33</sup>

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab. Yang berhubungan dengan Pasal 44 : Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit. Kalau tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan beberapa hal lain, misalnya jiwanya tidak normal karena masih sangat muda atau lain-lain, pasal tersebut tidak dapat dipakai. Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>34</sup>

Seseorang tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana jika dikatakan bahwa karena pertumbuhan organ atau alat-alat jiwanya cukup penuh, maka fungsi batin jiwanya juga belum sempurna.

---

<sup>33</sup> Ibid h.177

<sup>34</sup> Ibid h.178

Sebaliknya orang gila, meskipun sudah dewasa , tetapi jiwanya sakit, tidak normal, sehingga apa yang dipikirkan, apa yang diinsyafi ketika menyerang dan memukuli tadi, tidak mungkin disamakan dengan penginsafan kita. Orang yang demikian pun fungsi batinya tidak normal.

Anak di bawah umur yang tidak paham hukum tidak dapat dikenai pertanggungjawaban, sebagai contoh anak yang membakar rumah tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum mengerti makna perbuatan yang dilakukan, disebabkan karena umurnya masih terlalu muda.<sup>35</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan – peraturan yang tertulis atau bahan – bahan hukum yang lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid h.168-169

<sup>36</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.

### 1.6.2 Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian perpustakaan demikian dapat dikatakan pula sebagai lawan dari penelitian empiris ( Penelitian Lapangan ).

Termasuk dalam data sekunder meliputi buku – buku, buku – buku harian, surat – surat pribadi dan dokumen – dokumen resmi dari pemerintah. Data sekunder ini dapat bersifat pribadi dan publik, yang bersifat pribadi misalnya surat – surat, sejarah kehidupan seseorang, buku – buku harian dan lain – lain, sedang yang bersifat publik meliputi data resmi pada instansi pemerintah, data arsip, yurisprudensi mahkamah agung dan sebagainya. Pada penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber / bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier.

- a. Bahan hukum primer, misalnya Undang – Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, Undang – Undang dan lain – lain.
- b. Bahan hukum sekunder, misalnya karya – karya ilmiah, rancangan undang – undang, dan juga hasil – hasil dari suatu penelitian.
- c. Bahan hukum tertier, misalnya bibliografi, kamus dan lain – lain.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Ibid, h.14

### 1.6.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu pengumpulan data dengan data : Metode Penelitian Kepustakaan Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang – undangan, buku – buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.<sup>38</sup>

### 1.6.4 Teknik Analisis Data

Penulis dalam analisa data menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata – kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamatan lapangan, potret, tape video, dokumen perorangan, memorandum dan dokumen resmi, sehingga dapat dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit, karena itu analisis kualitatif tidak menggunakan alat bantu statistika.<sup>39</sup>

### 1.6.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun Sistematika Penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan: Di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, kemudian berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan. Selanjutnya disajikan tujuan

---

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.107

<sup>39</sup> Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, 2010, h. 128



dan manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Pada bagian Kajian Pustaka yang merupakan landasan dari penulisan skripsi, kemudian diuraikan beberapa konsep definisi yang berkaitan dengan judul penelitian. Selanjutnya diuraikan tentang metode penelitian yang merupakan salah satu syarat dalam setiap penelitian. Intinya mengemukakan tentang tipe penelitian dan pendekatan masalah, sumber bahan hukum, langkah penelitian, dan bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II, menjawab rumusan masalah pertama faktor-faktor apa yang mendorong pelaku yang turut serta dalam melakukan tindak pidana pemalsuan Akta Kelahiran. Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab, sub bab yang pertama tentang gambaran minimal kasus dalam putusan perkara Nomor : 288/Pid.B/2011/PN.Spg, sub bab yang kedua kualifikasi kasus tindak pidana pemalsuan akta kelahiran, sub bab ketiga faktor-faktor penyebab turut serta dalam tindak pidana pemalsuan.

Bab III, menjawab rumusan masalah kedua mengenai bentuk pertanggung jawaban pelaku yang turut serta dalam tindak pidana pemalsuan Akta Kelahiran. Pada bab ini terdiri pada beberapa sub bab, sub bab yang pertama tentang pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi dalam putusan Nomor : 288/Pid.B/2011/PN.Spg, sub bab yang kedua tentang pertanggungjawaban terhadap pelaku yang turut serta dalam pemalsuan Akta Kelahiran.

Bab IV, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran terhadap pokok permasalahan. Dalam bab ini penulis mencoba menyimpulkan dan memberikan usulan-usulan mengenai permasalahan yang telah dibahas dalam penulisan skripsi ini.